

## PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS PASAR KEBERSIHAN DAN TATA KOTA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

**Irza Setiawan**

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Email: iam.justakid@gmail.com

### *Abstract*

*One of problems in Hulu Sungai Utara Regency is garbage. The volume of waste in Amuntai is estimated to reach 100 cubic meters per day, while BPLH only has five trucks and four containers. Each freight car can only carry as much as six cubic meters. In carrying out the maximum transport of container a day can be done three times to four times. In this research, a qualitative approach is used to solve problems related to Waste Management in Market, Hygiene, and Urban Agency in Waste Management in Upper River North Regency, and the type of research used is descriptive as it is possible in a qualitative approach. Research results include insufficient facilities and infrastructure, lack of human resources, and also lack of community participation in participating in maintaining cleanliness due to lack of socialization. Suggestions given in the form of increasing the budget for the provision of facilities and infrastructure, to provide socialization by using television, radio, and sticker sticking, and held hygiene contest between villages.*

**Keywords:** *waste Management, human resources, facilities and infrastructure*

### PENDAHULUAN

Salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat modern dewasa ini adalah sampah sebagai akibat dari penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat sehingga volume sampah semakin hari juga semakin banyak. Sampah tidak hanya menjadi momok bagi negara-negara industri bertaraf maju tetapi juga negara-negara berkembang layaknya Indonesia yang memiliki populasi jumlah penduduk nomor empat terbesar di dunia dan dihuni oleh lebih dari 200 juta penduduk dari beragam etnis, agama, dan budaya. Tidak dapat disangkal, perkembangan industrialisasi yang begitu cepat disertai perilaku konsumtif sebagai eksek dari gaya hidup modern secara tidak langsung ditengarai juga ikut memicu semakin banyaknya volume sampah di lingkungan masyarakat.

Pada awalnya sampah hanyalah seperti perkara kecil yang kemudian bergerak dinamis memenuhi ruang publik akibat peran besarnya dalam peningkatan angka pencemaran lingkungan sekaligus penurunan derajat kesehatan masyarakat secara luas. Dibalik itu,

persoalan sampah justru sukar dicarikan solusi efektifnya sebab acapkali erat kaitannya dengan penyediaan sarana dan prasarana kebersihan yang memadai oleh pemerintah selaku alat negara di samping faktor lain seperti kebiasaan dan partisipasi masyarakat sendiri sebagai produsen utama sampah. Sebagaimana diungkapkan Usman (2003:234), “manusia mempunyai kemampuan untuk merubah dan memberi ciri pada lingkungan fisik ataupun lingkungan biologi”.

Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan. Ibukota kabupaten ini terletak di Amuntai. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 892,7 km<sup>2</sup> atau 2,38% dari luas provinsi Kalimantan Selatan dan berpenduduk sebanyak 209.037 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010). Secara umum Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak pada koordinat 2' sampai 3' Lintang Selatan dan 115' sampai 116' Bujur Timur.

Luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah ± 892,7 km<sup>2</sup> atau hanya ± 2,38

persen dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan luas wilayah sebesar 892,7 km<sup>2</sup> ini, sebagian besar terdiri atas dataran rendah yang digenangi oleh lahan rawa baik yang tergenang secara monoton maupun yang tergenang secara periodik. Kurang lebih 570 km<sup>2</sup> adalah merupakan lahan rawa dan sebagian besar belum dimanfaatkan secara optimal.

Volume sampah di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dinilai cukup tinggi, hingga mencapai 100 meter kubik per hari masih belum sebanding dengan armada angkutan sampah yang dimiliki Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) setempat. Tingginya volume sampah di Hulu Sungai Utara ini pun, mengakibatkan angkutan sampah yang ada harus dua kali putaran mengangkut sampah menuju ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Berakibat petugas menjadi kewalahan, apalagi sarana gerobak sampah bermerek tossa 4 unit dan 12 unit truk sampah yang digunakan tidak mencukupi dengan tenaga sopir yang hanya berjumlah 10 orang.

Volume sampah di Amuntai ini diperkirakan mencapai 100 meter kubik per hari, sedangkan BPLH hanya punya lima buah armada truk pengangkut dan empat container. Masing-masing mobil angkutan hanya bisa mengangkut sebanyak enam meter kubik. Dalam melakukan pengangkutan secara maksimal dengan container seharusnya bisa dilakukan sampai tiga kali hingga empat kali.

Lumayan mengkhawatirkan karena kota Amuntai merupakan kota dengan julukan kota bertakwa mempunyai masalah besar yaitu menumpuknya sampah lingkungan, dan apabila ditinjau dari sisi medis, kondisi lingkungan seperti itu dapat memicu derita lanjutan berupa penyakit kulit dan muntaber serta bau busuk yang menyengat hidung. Potensi bencana banjir oleh karena sedimentasi sungai akibat dipenuhi sampah dan saluran drainase yang tersumbat sampah terutama sekali pada musim penghujan juga merupakan suatu hal yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia.

Kita lihat lagi kebanyakan masyarakat di daerah terpencil di kabupaten Hulu Sungai Utara yang tidak bisa dilewati truk pengangkut sampah dan tidak mempunyai TPS di lingkungannya,

lebih memilih untuk membuang sampah ke sungai sehingga mengotori keindahan sungai, dan lama-kelamaan ini akan menjadi sumber penyakit bagi masyarakat.

Fenomena yang terjadi di atas tentunya tidaklah berdiri sendiri sebab dapat dipastikan terdapat beberapa faktor yang melekat dan saling terkait, baik secara langsung ataupun tak langsung dalam ranah berkenaan kebersihan lingkungan di mana leading sector terletak pada Dinas Kebersihan, Tata Kota dan Pasar Kabupaten Hulu Sungai Utara. Faktor-faktor tersebut dapat berupa sosialisasi kebersihan, anggaran dan sumber daya manusia dalam hal ini para petugas kebersihan serta hal-hal lain yang bersifat struktural.

Untuk menyikapinya, Edwards III (Subarsono, 2008:90; Winarno, 2005:153) kemudian menyampaikan pandangan teoritisnya bahwa sedikitnya terdapat empat variabel terkait dengan implementasi suatu kebijakan publik. Pertama, komunikasi terhadap kelompok sasaran (target group). Kedua, sumber daya, baik sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Ketiga, disposisi yakni watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Keempat, struktur birokrasi dalam hal ini menyangkut prosedur operasi yang standar (Standard Operating Procedures/SOP) dan fragmentasi organisasi. Oleh karena itulah, peneliti tergerak untuk meneliti dan menelaah lebih lanjut terkait fenomena di atas dengan meletakkan fokus perhatian pada kabupaten Hulu Sungai Utara.

Sehubungan dengan luasnya ruang lingkup persoalan sampah yang tidak tertangani dengan baik di Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka penelitian ini hanya akan difokuskan pada beberapa hal yang dianggap berperan besar dalam proses pengelolaan sampah seperti : 1). Sarana dan prasarana, 2) Petugas kebersihan, 3). Partisipasi masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan kualitatif dipilih dalam upaya menganalisa permasalahan berkenaan dengan Pengelolaan Sampah Pada Dinas Pasar, Kebersihan, dan Tata Kota Kabupaten Hulu Sungai Utara, cara ini ditempuh oleh karena "sifat permasalahan yang belum jelas, bersifat

holistik, kompleks, dinamis serta penuh makna” sebagaimana diungkapkan oleh Wahyu (2007:50). Sarman (2002:30) pun kemudian menambahkan, “metode penelitian kualitatif bermaksud untuk dapat meramu secara ilmiah pelbagai informasi yang dibangun, dikembangkan dan disampaikan oleh manusia atau komunitas tertentu yang notabene merupakan obyek dan sekaligus subyek dalam penelitian sosial”. Oleh sebab itu, metode penelitian kualitatif tampaknya merupakan sebuah metode yang relevan dalam upaya menjelaskan secara komprehensif berkenaan dengan fenomena pengelolaan persampahan di kawasan berjudul Kota Bertakwa yang secara kasat mata tidak terselenggara secara efektif.

Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif sebagaimana dimungkinkan dalam pendekatan kualitatif. Sarman (2003:18) mengatakan, “penelitian deskriptif kualitatif menggunakan metode-metode kualitatif untuk mengeksplorasi makna-makna, beragam variasi, dan pemahaman perseptual yang menyebabkan munculnya fenomena yang diteliti”.

Sumber data dipergunakan cara *purposive sampling*. Sarman (2002:79) menyebutkan, “kalau *purposive sampling* yang dipilih, maka peneliti ‘dengan sengaja’ harus memilih sampel observasinya yang dipercaya akan dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang gejala yang akan diteliti”.

Dalam penelitian ini, informan kunci (*key informan*) terdiri dari beberapa pihak dengan berbagai latar belakang. Secara mendetail, maka para informan kunci (*key informan*) sebagai data primer diantaranya adalah 1 orang kepala Dinas Kebersihan Kabupaten Hulu Sungai Utara, 1 orang kepala seksi angkutan sampah pada dinas kebersihan Kabupaten Hulu Sungai Utara, 1 orang staff kebersihan, 1 orang kepala desa tangga ulin hilir, desa tangga ulin hilir merupakan salah satu contoh desa yang berada di bantaran sungai di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan 4 orang warga masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan di kabupaten Hulu Sungai Utara hanya terbatas di beberapa wilayah

perkotaan seperti Paliwara, Sungai Malang, Kebun Sari, dan beberapa wilayah pedesaan seperti Hulu Pasar dan Sungai Karias, seperti yang di ketahui bahwa luas kabupaten Hulu Sungai Utara adalah 892,7 km<sup>2</sup> atau 2,38% dari luas provinsi Kalimantan Selatan Beberapa desa di kabupaten Hulu Sungai Utara tidak dimasukkan dalam pelayanan kebersihan oleh Dinas Pasar, Kebersihan dan Tata Kota adalah karena jumlah penduduk yang rendah, selain itu juga karena kondisi jalan yang tidak bisa dilewati, seperti di desa Tangga Ulin Hulu yang mempunyai jalan tanah basah sehingga bisa berpotensi longsor, dan sudah terbukti separuh jalan di desa itu terjadi longsor, di desa pakacangan yang masih mempunyai jalan kecil dan banyaknya rawa sehingga sulit di jangkau alat transportasi, banyaknya jalan yang masih menggunakan jembatan kecil.

Tentang Kebersihan Lingkungan, dibutuhkan sarana dan prasarana dalam komposisi yang memadai dilihat dari kuantitas maupun kualitas sehingga berdampak positif bagi terwujudnya lingkungan, Secara terperinci, sarana dan prasarana yang dimaksudkan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

### a. Bak Sampah

Untuk menampung sampah sebelum diangkut ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) oleh petugas gerobak sampah atau diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) langsung dengan armada dump truk, maka dibuatlah bak sampah oleh Dinas Kebersihan sebagai sarana untuk menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu karena jumlah bak sampah yang terbatas para masyarakat juga membuat sendiri sarana bak sampah ini, seperti kita lihat di deretan pertokoan, beberapa kantor dan lingkungan kampus seperti Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai juga membuat bak sampah tersendiri yang terbuat dari balok kayu, anyaman bamboo, plastik atau semen sebagai sarana untuk menjaga kebersihan di lingkungannya.

Bak sampah disiapkan oleh Dinas Kebersihan Kabupaten Hulu Sungai Utara, disebarkan di wilayah perkotaan seperti paliwara, sungai malang, kebun sari, dan beberapa wilayah pedesaan, bak sampah

terbuat dari sepenggal drum yang terbuat dari seng, walaupun demikian keberadaan bak sampah di Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya di daerah pelayanan kebersihan di seputar pusat kota terlihat masih belum cukup memadai atau dengan kata lain tidak sebanding dengan populasi jumlah penduduk dan volume sampah yang dihasilkan oleh warga masyarakat sehari-hari. Selain itu, ukuran bak sampah umumnya juga berukuran kecil (drum berukuran sekitar 0,5 meter) sehingga seringkali ditemui bungkus-bungkus sampah berhamburan oleh karena tidak tertampung di dalam bak sampah. Ditambah lagi dengan kehadiran para pemulung yang suka mengacak-acak isi bungkus sampah untuk kemudian setelah itu dibiarkan begitu saja, selain itu dilihat juga bahwa bak sampah yang tersedia mulai keropos dimakan terik mentari dan air hujan.

Di sisi lain, walaupun sebagian warga masyarakat telah membuang sampah pada sejumlah bak sampah yang disediakan namun sayangnya tanpa disertai dengan pemilahan sampah basah dan kering terlebih dahulu di tingkat domestik (rumah tangga), seperti bak sampah yang disediakan berlokasi di taman putri junjung buih, di sungai karias, di bihman villa, masih belum ada pengawasan yang memadai tentang pemilahan antara sampah basah dan sampah kering.

Seperti diketahui bahwa tidak semua warga masyarakat memiliki bak sampah sebagai tempat penampungan sampah sementara, sehingga banyak warga masyarakat yang menumpuk sampah-sampah mereka di depan rumah, bahkan ada juga yang berserakan dimana-mana sambil menunggu pengelola sampah untuk mengangkut sampah tersebut, seperti yang dilihat di lokasi Palampitan dan Kebun Sari. Selanjutnya, sampah yang berada di sejumlah bak sampah diangkut dengan armada gerobak dorong oleh petugas kebersihan untuk kemudian dibuang ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang terdekat. Sampah-sampah tersebut di angkut menggunakan empat unit motor triseda (Tossa) dan dua belas unit truck, yang disebar ke wilayah perkotaan seperti Paliwara, Sungai Malang,

Kebun Sari, Palampitan, Hulu Pasar, Sungai Karias dan beberapa wilayah pedesaan.

Pengangkutan sampah biasanya dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 08.00 WITA sampai 11.00 WITA, tetapi pengangkutan sampah yang tentunya setiap hari dilakukan oleh pengelola sampah kurang terjadwal dan bahkan terjadi secara acak, bahkan masyarakat mengeluhkan bahwa sampah mereka menumpuk karena pengelola sampah tidak datang setiap hari, hal ini bisa ditambah pula dengan adanya hari-hari libur, nampaklah keberadaan bak sampah baik yang disediakan oleh pemerintah daerah, ataupun masyarakat sangat membantu terhadap proses pengelolaan sampah khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Namun, dengan jumlah dan volume bak sampah yang tidak memadai, pemilahan sampah di tingkat domestik (rumah tangga) yang tidak berjalan, serta jadwal pembuangan sampah oleh masyarakat yang tidak tertib menjadikan fungsi bak sampah tidak begitu optimal.

Sementara Sadyohutomo (2008:133) mengatakan bahwa penyediaan prasarana dan sarana umum merupakan tanggung jawab pemerintah karena menyangkut hajat hidup orang banyak, baik untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari maupun kebutuhan sekunder. Tanggung jawab tersebut menyangkut penyediaan dan pengaturan dalam pengelolaan prasarana dan sarana.

#### b. Tempat Pembuangan Sementara (TPS)

Tempat Pembuangan Sementara (TPS) tidak lain adalah tempat yang dipergunakan untuk menampung sampah sementara sebelum pada akhirnya dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pada umumnya Tempat Pembuangan sementara (TPS) di kabupaten Hulu Sungai Utara terbuat dari tumpukan batu bata dan semen berbentuk kubus, TPS berbentuk kubus itu berisi sampah yang sebelumnya dikumpulkan oleh armada gerobak dorong ini setelah penuh kemudian diangkut atau dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) oleh armada truk Arm Roll yang beroperasi hampir setiap hari

pada jam yang bervariasi dari pagi hingga selesai.

Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tempat Pembuangan Sementara (TPS) terletak di jalan Bihman Villa, Soewandi Sumarta, Kebun Sari, Pangeran Antasari, Haji Ali, Empu Jatmika, Basuki Rahmat, Negara Dipa, dan tiap jalan kecamatan di wilayah Hulu Sungai Utara” Jikalau dilihat dari segi kondisi, TPS di Kabupaten Hulu Sungai Utara kondisinya memadai, dengan catatan apabila sampah di angkut setiap hari, dari pengamatan biasanya di hari minggu tidak ada pengangkutan sampah, ini dikarenakan faktor hari libur kerja, sehingga berdampak kepada sampah menumpuk. Dari paparan disini jelas bahwa sampah tidak boleh dibiarkan menumpuk terlalu lama, karena selain menyebabkan bau tidak sebab, mengganggu pemandangan, hal ini juga bisa mengakibatkan rasa tidak nyaman bagi masyarakat, karena itu pengelola sampah harus secara rutin mengangkut sampah-sampah masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan.

Selain itu peletakan TPS juga perlu diperhatikan agar tidak merusak keindahan kota. Peletakan TPS khususnya di daerah Kota Raja kurang strategis dalam ruang kota, karena merupakan jalan simpang empat dan menjadi alur jalan bagi alat transportasi seperti bus. Tentunya kondisi peletakan TPS yang merupakan penumpukan sampah sementara perlu di perhatikan, karena ini bisa mengganggu kenyamanan masyarakat jika sampah dibiarkan menumpuk di tempat-tempat padat penduduk. Dari pengamatan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ini juga masih sangat kurang jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat, karena beberapa lokasi yang tentunya masih termasuk kawasan Hulu Sungai Utara tidak mempunyai Tempat Pembuangan Sementara (TPS), seperti desa Tangga Ulin Hilir, Tangga Ulin Hulu, Pakacangan, Tanggul, Lok Bangkai, dan desa-desa lain dengan jalan kecil yang tidak bisa dilalui oleh armada truck pengangkut sampah.

Dari hasil wawancara ini tentunya pihak Dinas Kebersihan harus menyediakan

Tempat Pembuangan Sementara di segala bidang karena ini merupakan kebutuhan masyarakat, harus ada pengawasan antara pemilahan sampah organik dan anorganik, serta peletakan Tempat Pembuangan Sementara harus dilokasi yang strategis yang tidak mengganggu kenyamanan masyarakat.

#### c. Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang diperuntukkan bagi pemanfaatan dan pemusnahan sampah di Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak di desa Tebing Liring yang berjarak sekitar 10 Km dari Kabupaten Hulu Sungai Utara. “Proses pembuangan akhir sampah dilakukan dengan cara sanitary landfill” Berarti setelah sampah dikumpulkan, kemudian sampah-sampah tersebut ditimbun kedalam tanah, dengan demikian cara ini bisa menekan polusi atau bau dari sampah tersebut.

#### d. Armada dan Peralatan Kerja

Untuk menunjang pengelolaan sampah di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Dinas Kebersihan mempunyai beberapa sarana seperti empat unit gerobak sampah dan dua belas unit truck, untuk peralatan ini semuanya masih layak pakai, hanya saja terjadi ketidak seimbangan antara sarana dengan petugas kebersihan sehingga menjadi kendala dalam mewujudkan kebersihan dalam cakupan yang luas.

Dinas kebersihan mempunyai dua belas unit truck pengangkut sampah, dan empat motor tresa (Tessa) tetapi hanya ada sepuluh orang sopir yang menggunakannya, hal ini ditambah lagi dengan tidak adanya gerobak-gerobak sampah yang disediakan oleh Dinas Kebersihan untuk menjaga kebersihan di desa-desa yang masih belum ada Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Dan tentunya sangat penting untuk disediakan gerobak-gerobak sampah di tempat-tempat wilayah kabupaten Hulu Sungai Utara dengan areal jalan sempit dan berada di dekat bantaran sungai contohnya seperti desa Tangga Ulin Hilir dan Tangga Ulin Hulu.

Dari pengamatan ditemukan bahwa sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah di Kabupaten Hulu Sungai Utara

masih sangat kurang, di tambah lagi dengan petugas kebersihan yang masih sangat minim sehingga menyulitkan mereka dalam bekerja. Kalau dibandingkan dengan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Kebersihan Kabupaten Hulu Sungai Utara seperti yang disebutkan pada ayat (2) mengungkapkan bahwa menyelenggarakan fungsi diantaranya:

- 1) Pengolahan satuan tugas dan prasarana kebersihan;
- 2) Perencanaan Satuan Tugas dan Prasarana Kebersihan;
- 3) Pengawasan Satuan Tugas dan Prasarana Kebersihan; dan
- 4) Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Padahal beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Robert L. Mathis dan John H Jackson (2001:82) adalah Kemampuan Pekerja dan Keberadaan Pekerjaan yang mereka lakukan.

Keberadaan dari petugas kebersihan dalam sistem operasional pengelolaan sampah dengan pembagian kerja yang terperinci merupakan salah satu ujung tombak bagi penciptaan lingkungan yang bersih di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Jumlah petugas kebersihan ada 60 orang, terdiri dari petugas sampah yang sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil sebanyak 12 orang, tenaga honor penyapu sebanyak 31 orang, dan tenaga penyapu yang sudah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 17 orang. Walau demikian, pengangkutan sampah yang biasanya dilakukan di pagi hari dari pukul 08.00 wita sampai 11.00 ini tidak rutin dilakukan, salah satu penyebabnya adalah adanya hari libur kerja, pengangkutan sampah yang tertunda tentunya berdampak kepada menumpuknya sampah.

Sementara itu menurut Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pasar, Kebersihan, dan Tata Kota Kabupaten Hulu Sungai Utara yang termasuk pada ayat (2) menyebutkan bahwa pembuatan dan penetapan jadwal pembuangan sampah dari pemukiman penduduk ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan kontainer hingga ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan cara

membagi tugas kepada satuan petugas angkutan sampah guna kelancaran pelaksanaan tugas.

Dari pengamatan yang dilakukan tentunya yang jadi faktor utama kenapa pengelolaan sampah di kabupaten Hulu Sungai Utara bermasalah adalah kurangnya sumber daya manusia sehingga para tenaga-tenaga pengelola sampah tidak bisa menyentuh segala lapisan masyarakat, selain itu sarana dan prasaranapun juga masih sangat kurang seperti belum adanya gerobak-gerobak sampah yang bisa mengangkut sampah di jalan-jalan kecil atau di gang-gang kecil.

Sementara itu Rudy (2003:57) mengatakan Perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penyelenggaraan sarana-sarana pendidikan, pelayanan kesehatan dan kebersihan, pengaturan dan penyediaan prasarana transportasi dan lain-lain. Karena itu solusi yang bisa di tempuh adalah adanya koordinasi kepada para kepala desa untuk daerah desa dengan jalan-jalan sempit yang tidak bisa dilalui oleh truck angkutan sampah agar di desa tersebut membentuk tim pengangkut sampah setiap harinya agar sampah yang terkumpul bisa di distribusikan ke tempat penampungan sementara (TPS).

#### e. Partisipasi Masyarakat

Di kabupaten Hulu Sungai Utara, volume sampah diperkirakan mencapai 100 meter kubik perhari, partisipasi masyarakat dalam pengelola sampah lumayan baik, hal ini bisa dilihat dari banyaknya masyarakat yang membuat bak sampah sendiri baik dari plastik, anyaman bambu, semen dan lain sebagainya. hanya saja partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan ini tidak diimbangi dengan penyediaan Tempat Pembuangan Sampah dari Dinas Kebersihan.

Dari sini perlunya keseimbangan antara partisipasi masyarakat dalam mengelola kebersihan dengan penyediaan sarana dari Dinas Kebersihan dalam pengelolaan sampah di kabupaten Hulu Sungai Utara, akan tetapi masyarakat masih belum terlalu memperhatikan partisipasi

dalam pemilahan antara sampah basah dengan sampah kering, sehingga terjadi pencampuran antara sampah organik dan anorganik. Tentunya dalam masalah ini, Dinas Kebersihan Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat Hulu Sungai Utara agar tercipta kerjasama dalam pengelolaan sampah, sosialisasi bisa ditempuh salah satunya dengan cara pemasangan stiker, spanduk, informasi dari radio, televisi, maupun lewat media sosial.

Tentunya kurang sosialisasi berakibat kurangnya pengetahuan di masyarakat tentang proses pengelolaan sampah di kabupaten Hulu Sungai Utara, terlebih lagi ternyata bagi warga Hulu Sungai Utara yang ketahuan membuang sampah di sembarang tempat masih belum ada sanksi yang tegas, hanya berbentuk teguran secara lisan.

Dari pengamatan ini, guna menunjang terjalannya partisipasi masyarakat yang baik dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Hulu Sungai Utara, pihak Dinas Kebersihan Kabupaten Hulu Sungai Utara harus menunjang berbagai sarana kebersihan seperti penyediaan TPS serta gerobak-gerobak sampah yang bisa dilalui di jalan-jalan kecil atau gang-gang kecil yang tidak bisa dilalui oleh alat transportasi, sehingga sampah-sampah yang sudah dikumpulkan masyarakat bisa diproses menuju TPA.

Selain itu pihak Dinas Kebersihan juga harus memperbanyak sosialisasi tentang pentingnya menjaga kebersihan ke masyarakat khususnya informasi tentang pentingnya pemilahan antara sampah basah dan sampah kering, serta perlunya pemberian sanksi yang tegas terhadap masyarakat yang kedapatan melanggar peraturan guna terciptanya pengelolaan sampah yang baik di kabupaten Hulu Sungai Utara.

### **Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Pengelolaan Sampah**

#### **1. Kurangnya Sarana dan Prasarana**

Dalam menunjang pengelolaan sampah di Kabupaten Hulu Sungai Utara, ketersediaan sarana dan prasarana sangat penting untuk memudahkan proses pekerjaan

para petugas sampah, Keberadaan bak sampah di Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya di daerah pelayanan kebersihan di seputar pusat kota terlihat masih belum cukup memadai atau dengan kata lain tidak sebanding dengan populasi jumlah penduduk dan volume sampah yang dihasilkan oleh warga masyarakat sehari-hari. Selain itu, ukuran bak sampah umumnya juga berukuran kecil (drum berukuran sekitar 0,5 meter) sehingga seringkali ditemui bungkus-bungkusan sampah berhamburan oleh karena tidak tertampung di dalam bak sampah. Ditambah lagi dengan kehadiran para pemulung yang suka mengacak-acak isi bungkus sampah untuk kemudian setelah itu dibiarkan begitu saja, selain itu dilihat juga bahwa bak sampah yang tersedia mulai keropos dimakan terik mentari dan air hujan.

Kualitas dari sarana yang diberikan juga merupakan faktor rendahnya pengelolaan sampah di Kabupaten Hulu Sungai Utara, selain itu kurangnya sarana berupa Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di beberapa tempat seperti desa Tangga Ulin, Pakacangan, Lok Bangkai, dan sekitarnya juga menjadi pemicu rendahnya pengelolaan sampah di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sebenarnya bisa dikatakan baik, hal ini terlihat dari pengumpulan sampah rumah tangga, hanya saja ketika sampah rumah tangga terkumpul, sementara sarana TPS belum tersedia di tempat tersebut, karena itu sampah yang terkumpul tersebut di buang ke sungai. Selain itu sarana yang tersedia pada Dinas Kabupaten Hulu Sungai Utara juga sangat kurang, Dinas Kebersihan Kabupaten Hulu Sungai Utara belum memiliki gerobak sampah yang bisa digunakan untuk mengangkut sampah-sampah masyarakat yang terkumpul di jalan-jalan kecil atau gang-gang kecil yang tidak bisa dilalui masyarakat, maka bisa dikatakan bahwa faktor penyebab rendahnya pengelolaan sampah di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah kurangnya sarana dan prasarana.

#### **2. Kurangnya Sumber Daya Manusia**

Kurangnya Sumber Daya Manusia juga merupakan penyebab rendahnya pengelolaan sampah di Kabupaten Hulu Sungai Utara, salah satunya terjadi ketidakseimbangan antara sarana yang ada dengan jumlah pengelola sampah yang ada. Dinas kebersihan mempunyai dua belas unit truck pengangkut sampah, dan empat motor tresa (Tessa) tetapi hanya ada sepuluh orang sopir yang menggunakannya”.

Untuk menunjang pengelolaan sampah yang baik, tentunya harus ada ketersediaan yang memadai antara sarana yang digunakan dengan jumlah petugas yang mengerjakannya, apalagi karena kurangnya sumber daya ini, pelayanan tidak bisa menyentuh ke segala lapisan masyarakat, khususnya masyarakat yang berdomilisi di jalan-jalan kecil dan gang-gang kecil yang tidak bisa dilalui alat transportasi.

Selain itu pengelola sampah juga kurang konsisten dalam menjalankan tugasnya, pengangkutan sampah terkadang tidak dilakukan setiap hari sehingga membuat sampah-sampah masyarakat yang sudah terkumpul di TPS semakin menumpuk dan mengganggu masyarakat.

Dari hasil pengamatan ini bisa dikatakan bahwa kurangnya sumber daya manusia dari pengelola sampah pada Dinas Kebersihan Kabupaten Hulu Sungai Utara juga merupakan faktor rendahnya pengelolaan sampah di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

### 3. Kurangnya Sosialisasi

Untuk mewujudkan kebersihan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, tentunya harus ada kerjasama antara Dinas Kebersihan dengan para warga masyarakat sendiri dalam mengelola sampah di Kabupaten Hulu Sungai Utara, salah satu wujud terjalannya kerjasama adalah adanya sosialisasi dari Dinas Kebersihan sendiri kepada warga masyarakat, akan tetapi Dinas Kebersihan sendiri sangat kurang dalam melakukan sosialisasi, sehingga warga masyarakat masih banyak belum mengerti tentang pengelolaan sampah yang baik di lingkungannya, salah satunya masih banyaknya warga yang belum memilah antara sampah basah dan sampah

kering, membuang sampah ke sungai atau ke pinggir rumah, dan lain sebagainya.

Tentunya sosialisasi merupakan hal yang sangat penting guna menunjang terwujudnya lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang bersih, akan tetapi sosialisasi yang dilakukan sangat kurang, Dalam setahun, Dinas kebersihan hanya dua kali mengadakan sosialisasi, dari pengamatan ini dapat dikatakan bahwa kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh Dinas kebersihan kepada warga masyarakat merupakan faktor rendahnya pengelolaan sampah di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Peraturan Daerah bertalian dengan pengelolaan sampah yang secara umum bertujuan untuk mengelola sampah secara baik dan sehat di lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Sampah yang dalam hemat Kastaman dan Kramadibrata (2007:72) terdiri atas “sampah basah (*garbage*), sampah kering (*rubbish*), dan sampah lembut” merupakan salah satu persoalan yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat di era mutakhir saat ini. Untuk menanganinya tentu menghajatkan hadirnya suatu kebijakan khususnya di tingkat lokal sebab dituturkan oleh Subarsono (2008:14), “tuntutan kebijakan dapat dilahirkan karena pengaruh lingkungan dan kemudian ditransformasikan ke dalam suatu sistem politik”.

Apalagi sampah adalah barang sisa yang tidak terpakai yang apabila tidak dikelola dengan baik dan dibiarkan mengendap begitu saja, akan menimbulkan berbagai macam masalah dan sangat mengganggu masyarakat sebagai objek pelayanan dari Dinas Kebersihan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Departemen Pekerjaan Umum menyatakan, sampah adalah sesuatu yang tidak berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya atau pemakai semula. Sampah adalah sumberdaya yang tidak siap pakai. Sampah adalah limbah yang bersifat padat, yang terdiri dari zat organik dan zat anorganik, yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan.

Hakim dkk (2006:1) menyatakan, “sampah selalu identik dengan barang sisa atau hasil buangan tak berharga. Meski setiap hari manusia selalu menghasilkan sampah, manusia pula yang paling menghindari sampah”. Kastaman dan Kramadibrata (2007:11) mengemukakan bahwa sampah (*waste*) pada dasarnya adalah zat-zat atau benda-benda yang sudah tidak terpakai lagi, baik berupa buangan domestik (rumah tangga) maupun buangan pabrik sebagai sisa proses industri. Sampah yang berasal dari daerah pemukiman umumnya merupakan sampah organik yang cepat lapuk (*garbage*), yaitu sisa sayuran, nasi basi, berbagai jenis kertas, daun, air larutan deterjen bekas cucian, tinja (*faeces*), dan urin. Sedangkan sampah industri umumnya merupakan sampah organik yang lambat lapuk (*rubbish*), misalnya limbah pabrik berupa kertas karton, ampas, limbah sisa gergajian dan serpihan kayu, serbuk besi dan logam lainnya, karton, plastik, kaca, mika, dan sebagainya. Secara kimiawi, sampah-sampah tersebut dibedakan sebagai sampah organik dan sampah anorganik.

Karena itu harus ada pengelolaan sampah yang baik untuk menciptakan kenyamanan bagi masyarakat, dan Menurut hemat Kastaman dan Kramadibrata (2007:17), organisasi pengelola persampahan mempunyai proses sebagaimana halnya organisasi modern lainnya. Output dari sistem dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Secara kualitatif berupa pembuangan sampah akhir yang bersih, rapi, tertib, indah, dan kota yang bersih. Sedangkan secara kuantitatif berupa pelayanan yang semakin memuaskan masyarakat berdasarkan persentase pelayanan terhadap jumlah penduduk, luas kota, atau jumlah sampah kota yang terangkut setiap harinya.

Oleh karena itu, untuk menjelaskan secara riil tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang kurang berjalan dengan efektif, setidaknya dapat dilihat dari beberapa hal pokok yang mencakup sarana dan prasarana kebersihan, petugas kebersihan, partisipasi masyarakat

Sebagaimana dikemukakan oleh Islamy (2007:17), “suatu kebijakan publik akan menjadi efektif bila dilaksanakan dan mempunyai dampak positif bagi anggota-anggota masyarakat. Atau dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia yang menjadi anggota masyarakat itu bersesuaian dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara”.

#### 1. Sarana dan Prasarana

Untuk dapat merealisasikan pengelolaan sampah yang baik di Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka dibutuhkan sejumlah sarana dan prasarana penunjang dalam jumlah memadai khususnya oleh pemerintah daerah setempat sebagai pelaksana kebijakan.

Seperti dinyatakan Sadyohutomo (2008:133), penyediaan prasarana dan sarana umum merupakan tanggung jawab pemerintah karena menyangkut hajat hidup orang banyak, baik untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari maupun kebutuhan sekunder. Tanggung jawab tersebut menyangkut penyediaan dan pengaturan dalam pengelolaan prasarana dan sarana.

Untuk itu, dalam hal pengelolaan sampah tanggung jawab pemerintah dapat berupa ketersediaan tempat atau bak sampah, Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Tempat Pembuangan Akhir (TPA), serta armada dan peralatan kerja lain yang diperlukan. Urgensinya, dalam pengelolaan sampah terdapat faktor-faktor dasar yang diklasifikasikan oleh Kastaman dan Kramadibrata (2007:17) meliputi “pewadahan sampah, pengumpulan sampah, pemindahan sampah, pengangkutan sampah, pengelolaan dan pemanfaatan sampah, serta pembuangan akhir sampah sebagai proses terakhir dalam siklus pengelolaan persampahan formal”.

Hal ini juga termaktub dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2010 Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Kepala Seksi Satuan Tugas dan Prasarana Kebersihan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengolahan satuan tugas dan prasarana kebersihan;
- b. perencanaan Satuan Tugas dan Prasarana Kebersihan;
- c. pengawasan Satuan Tugas dan Prasarana Kebersihan; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Dari pengamatan yang dilakukan, diketahui bahwa sarana dan prasarana Dinas Kebersihan Kabupaten Hulu Sungai Utara sangat kurang dan kondisinya pun kurang memadai, seperti yang diketahui bahwa bak sampah yang disediakan Dinas Kebersihan Kabupaten Hulu Sungai Utara dibikin mulai tahun 2009, dan selama dua tahun pemakaian, masih belum ada pengawasan dan pemeliharaan sehingga bak sampah tersebut mulai rapuh dan keropos dimakan cuaca.

Penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) pun tidak mencakup ke segala penjuru kawasan Kabupaten Hulu Sungai Utara, terlebih lagi di jalan-jalan kecil dan gang-gang kecil sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi kurang efektif. Salah satunya dari warga Tangga Ulin Hilir sangat menjaga kebersihan, namun karena tidak adanya TPS, akhirnya para warga mengumpulkan sampah tersebut kemudian membuangnya ke sungai.

Kiranya pengelola sampah di kabupaten Hulu Sungai Utara perlu menempuh jalan baik yang bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat sampai kelapisan masyarakat yang bedomilisi di jalan-jalan kecil yang tidak bisa dilalui oleh armada truck pengangkut sampah.

Hal ini bisa dimulai dengan terjalannya kerjasama antara Dinas Kebersihan dengan kepala desa setempat dimana di wilayahnya belum tergapai pelayanan oleh pengelola sampah seperti belum adanya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) atau belum adanya

petugas kebersihan yang mengangkut sampah pada kawasan yang tidak bisa dilalui alat transportasi.

## 2. Petugas Kebersihan

Dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah, sumber daya manusia merupakan unsur dinamis guna pencapaian tujuan negara. Tidak mengherankan apabila urgensi terhadap ketersediaan sumber daya manusia yang dilandasi oleh spirit *public service* tidak pernah luput dari setiap pembahasan terkait aktivitas rutin pemerintahan di mana ‘sumber daya manusia merupakan bagian tidak terpisahkan dari organisasi’ sebagaimana diungkapkan oleh Golden dan Ranunanjam (Usmara,2003:7).

Terlebih pada lingkup administrasi publik yang disebut Keban (2008:16) sebagai medan di mana para aparat pemerintah atau eksekutif melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan sektor publik khususnya penyediaan pelayanan bagi kepentingan publik sehingga peran administrasi publik sangat menentukan kestabilan, ketahanan, dan kesejahteraan suatu negara.

Ketersediaan sumber daya manusia dalam rangka pengelolaan sampah di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dalam hal ini petugas kebersihan sebagai pelaksana di lapangan cukup diperhatikan. Tercatat Jumlah petugas kebersihan ada 60 orang, terdiri dari petugas sampah yang sudah berstatus PNS sebanyak 12 orang, tenaga honor penyapuan sebanyak 31 orang, dan tenaga penyapuan yang sudah PNS sebanyak 17 orang.

Walaupun demikian, dilihat dari sisi kualitas maupun kuantitas, maka sumber daya manusia dalam hal ini petugas kebersihan merupakan salah satu persoalan yang tengah dihadapi oleh Dinas Kebersihan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam upaya menciptakan lingkungan yang bersih. Telah diketahui bersama bahwa pengelolaan sampah ini sudah barang tentu memerlukan

dukungan sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini dikatakan Wahab (1991:49) terdiri atas “pemrakarsa kebijakan (*the center*), pejabat-pejabat pelaksana di lapangan (*the periphery*), dan aktor-aktor perorangan di luar badan-badan pemerintahan kepada siapa program itu ditujukan yakni kelompok sasaran (*target group*)” agar tujuan atau dampak yang dikehendaki dari suatu kebijakan dapat terwujud.

Namun, dikarenakan ketersediaan petugas kebersihan yang dikerahkan oleh Dinas Pasar, Kebersihan dan Tata Kota Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai instansi yang memegang kemudi operasional pengelolaan sampah di Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak berkorelasi secara signifikan terhadap karakteristik pekerjaan dan luas wilayah, maka apa yang diungkapkan di atas tidak dapat terpenuhi. Ditambah dengan kurang bertanggung jawabnya sebagian petugas kebersihan terhadap apa yang ditugaskan kepadanya. Imbasnya, pengelolaan sampah tidak berjalan dengan efektif terutama Keban (2008:109) telah mengingatkan, dalam pengelolaan sumber daya manusia perlu diperhatikan jumlah, jenis, kualitas, distribusi, dan utilisasi sumber daya manusia yang bekerja dalam organisasi. Jumlah, jenis, dan kualitas sangat berkenaan dengan tuntutan pekerjaan-pekerjaan yang ada. Distribusi sumber daya manusia sangat bergantung kepada beban kerja dari setiap unit kerja yang ada, sementara itu utilisasi sangat tergantung kepada komitmen yang dimiliki.

Sementara itu menurut Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pasar, Kebersihan, dan Tata Kota Kabupaten Hulu Sungai Utara yang termasuk pada ayat (2) menyebutkan bahwa “Pembuatan dan penetapan jadwal pembuangan sampah dari pemukiman penduduk ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan kontainer hingga ke

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan cara membagi tugas kepada satuan petugas angkutan sampah guna kelancaran pelaksanaan tugas”.

Apa yang diungkapkan di atas memiliki kesamaan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Darmawisata di Kabupaten Kotabaru pada tahun 2007 dan juga Puskota Ubaya bekerja sama dengan KITA Jepang dan Pemerintah Kota Surabaya di Surabaya pada tahun 2007 di mana upaya pengelolaan sampah terhambat oleh karena terbatasnya tenaga kerja dan disiplin aparat. Dengan begitu, diperoleh pula makna adanya hambatan terhadap efektivitas kebijakan publik yang berasal dari dalam organisasi, yakni ketersediaan dan kualitas dari petugas kebersihan sebagaimana dituturkan Keban (2008:78), “hambatan dari dalam dapat dilihat dari ketersediaan dan kualitas input yang digunakan seperti sumber daya manusia, dana, struktur organisasi, informasi, sarana dan fasilitas yang dimiliki serta aturan, sistem, dan prosedur yang harus digunakan”.

Akibat keterbatasan sumber daya manusia ini, sehingga sarana yang ada untuk menunjang pengelolaan sampah di Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi tidak seimbang, seperti yang kita ketahui bahwa Dinas Kebersihan Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki 12 unit truck pengangkut sampah, tetapi yang menjadi sopir hanya 10 orang.

### 3. Partisipasi Masyarakat

Lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang bersih tentu tidak hanya menjadi dambaan pemerintah daerah setempat tetapi juga masyarakat yang mendiami daerah tersebut di mana dalam aktivitas kesehariannya mereka akan selalu bersentuhan dengan sampah khususnya sampah rumah tangga. Dalam hal ini, Kastaman dan Kramadibrata (2007:11) mengungkapkan, dalam kegiatan kehidupan domestiknya, setiap manusia

memproduksi sejumlah sampah dalam bentuk padatan dengan volume ruang antara 3-5 liter atau sekitar 1-3 kg sampah/hari baik sampah organik (tinja, sisa dapur, sisa makanan) maupun sampah anorganik (kertas, plastik, kaca dan sebagainya).

Oleh karenanya, dalam tataran empirik terutama pada tahapan pengelolaan sampah khususnya di kabupaten Hulu Sungai Utara tentunya memerlukan adanya pelibatan masyarakat setempat secara aktif dan berkesinambungan. Ditambah lagi kebijakan tersebut berdimensi luas dan memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan hidup masyarakat di mana lingkungan yang bersih akan berdampak pada derajat kualitas kehidupan manusia sebagaimana diutarakan Sumardi dan Evers (1982:3) bahwa “partisipasi mempunyai hubungan dengan kebutuhan pokok”. Dan apabila ditinjau secara makro, partisipasi masyarakat dalam berbagai program pembangunan sungguh tidak dapat dipisahkan sebab hal itu merupakan salah satu indikator penting dalam upaya pencapaian tujuan negara di mana kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah guna meraih kemajuan selalu mengikat masyarakat secara umum.

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksudkan di atas dapat berupa penyediaan bak sampah selain dari yang telah disediakan oleh Dinas Pasar, Kebersihan dan Tata Kota, tidak membuang sampah sembarangan atau di luar tempat-tempat sampah yang disediakan oleh masyarakat ataupun pemerintah daerah, membuang sampah pada Tempat Pembuangan Sementara (TPS) hanya pada waktu yang ditentukan yakni pada jam 06 sore sampai jam 06 pagi. Berikutnya, tidak menaruh, menumpuk, atau membiarkan barang-barang tak terpakai atau tak berguna lagi, tidak membuang sampah ke sungai, serta membakar sampah dalam jumlah besar di pekarangan atau

tempat-tempat yang memungkinkan terjadinya kebakaran atau mengakibatkan pencemaran lingkungan di samping juga tidak merusak berbagai fasilitas kebersihan, baik yang dibangun oleh pemerintah daerah setempat maupun swadaya masyarakat sendiri.

Ringkasnya, dalam hemat Kastaman dan Kramadibrata (2007:18), “masyarakat banyak berperan dalam proses penempatan dan pengumpulan sampah sehingga memudahkan dalam pemindahan, pengangkutan, pengelolaan, serta pemanfaatan dan pembuangan sampah akhir yang selama ini ditangani oleh pemerintah daerah”.

Dari penelitian yang dilakukan, partisipasi masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dalam upaya mendukung misi pemerintah daerah menciptakan lingkungan yang bersih tampak bernilai kurang, terbukti dari tidak adanya pemilahan sampah basah dan kering, serta masih terlihat adanya aktivitas pembakaran sampah dan pembuangan sampah ke sungai atau ke sembarang tempat.

Berarti di sini terdapat kesamaan dengan hasil penelitian yang dilakukan Darmawisata di Kabupaten Kotabaru pada tahun 2007 dan Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran Bandung di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2008 di mana partisipasi masyarakat merupakan salah satu penghambat bagi upaya pengelolaan sampah termasuk di sini pengetahuan praktis pengolahan sampah di tingkat masyarakat yang masih rendah. Dengan begitu, dapatlah dikatakan bahwa dalam pengelolaan sampah terdapat hambatan yang berasal dari luar yakni masyarakat selaku kelompok sasaran (*target group*) di mana Keban (2008:78) berpendapat, “hambatan dari luar dapat dibedakan atas semua kekuatan yang berpengaruh langsung ataupun tidak langsung kepada proses implementasi itu sendiri, seperti

peraturan atau kebijakan pemerintah, kelompok sasaran, kecenderungan ekonomi, politik, kondisi sosial budaya, dan sebagainya”.

Terhambatnya upaya pengelolaan sampah di Kabupaten Hulu Sungai Utara dikarenakan masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Hal semacam itu tentunya juga dapat menghambat ketercapaian tujuan dari pengelolaan sampah sebab partisipasi masyarakat menduduki peran penting dalam proses pembangunan sebagaimana Sumardi dan Evers (1982:3) menunjukkan dua alasan terkait dengan pentingnya partisipasi, yakni :

- a. Alasan etis dalam arti pembangunan demi manusia berpartisipasi sebagai subjek, manusia tidak akan menjadi manusia bila semata-mata ia hanya menjadi objek.
- b. Alasan sosiologis, yaitu apabila pembangunan diharapkan berhasil dalam jangka panjang tidak bisa tidak ia harus menyertakan sebanyak mungkin orang, kalau tidak pembangunan pasti akan macet.

Faktor penyebab rendahnya pengelolaan sampah bisa dilihat pada kebijakan publik yang terlahir dari pemerintah, merupakan salah satu sarana efektif bagi pemerintah untuk menjelaskan eksistensinya dalam membangun perikehidupan rakyat sehingga tidak salah apabila Conhran dan Malone (Yustika,2003:8) berpendapat bahwa ‘sebuah kebijakan dimaknai sebagai publik (kebijakan publik) bila kebijakan tersebut berkaitan dengan keputusan dan tindakan pemerintah yang didesain untuk menyelamatkan persoalan rakyat (*public concern*)’. Ditambahkan Islamy (2007:107), “semua kebijakan publik apapun bentuknya/jenisnya, dimaksudkan untuk mempengaruhi dan mengontrol perbuatan manusia sesuai dengan aturan-aturan dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau negara”. Dengan demikian, dalam esensi kebijakan publik terdapat hubungan timbal-balik antara pemerintah dan rakyat yang dikokohkan dalam ruang publik mengingat “kebijakan publik

selalu mengandung setidaknya-tidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik, dan cara mencapai sasaran tersebut” sebagaimana disampaikan Wibawa (1994:15).

Berkaitan dengan pengelolaan sampah pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Tata Kota Kabupaten Hulu Sungai Utara teridentifikasi beberapa faktor rendahnya pengelolaan yang didapat dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, yakni sarana dan prasarana yang kurang, kurangnya sumber daya manusia (petugas kebersihan), dan kurangnya sosialisasi.

#### 1. Sarana dan prasarana

Pengelolaan sampah pada Dinas Pasar,Kebersihan dan Tata kota berjalan kurang efektif, salah satunya karena kurangnya sarana dan prasarana yang diperlukan untuk proses pengelolaan sampah, sementara itu secara khusus Sadyohutomo (2008:133) menandakan bahwa penyediaan prasarana dan sarana umum merupakan tanggung jawab pemerintah karena menyangkut hajat hidup orang banyak, baik untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari maupun kebutuhan sekunder. Tanggung jawab tersebut menyangkut penyediaan dan pengaturan dalam pengelolaan prasarana dan sarana. Karena itu pihak Pemerintah daerah sendiri harus menyediakan sarana dan prasarana yang cukup untuk menunjang pengelolaan sampah di kabupaten Hulu Sungai Utara, khususnya penyediaan gerobak sampah dan penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) terutama pada kawasan terpencil yang tidak tersentuh pengelolaan sampah serta berdekatan dengan sungai seperti di wilayah desa Tangga Ulin.

#### 2. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang sebuah pengelolaan sampah yang baik tentunya harus di topang oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan cukup, sarana yang di gunakan harus seimbang dengan pengelola sampah sendiri, dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa ternyata Dinas Pasar, Kebersihan dan Tata Kota memiliki 12 unit truck sampah, tetapi hanya memiliki 10 orang sopir.

Tentunya masalah ini membuat pemanfaatan sarana yang ada menjadi tidak

seimbang, masalah ini juga berimbas kepada tidak terjangkaunya pelayanan pengelolaan sampah ke seluruh wilayah sebagai target pelayanan, terlebih lagi pihak pengelola sampah di Kabupaten Hulu Sungai Utara sendiri masih belum mempunyai gerobak sampah yang bisa dipergunakan untuk mengangkut sampah-sampah yang terkumpul di masyarakat yang tidak bisa di lalui oleh alat transportasi seperti di kawasan jalan kecil atau gang kecil.

Untuk mengatasi masalah ini harus ada kerjasama yang baik dari dinas Kebersihan, Pasar, dan Tata Kota sendiri kepada warga masyarakat untuk ikut serta dalam mengelola sampah demi terciptanya kebersihan lingkungan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

### 3. Kurangnya Sosialisasi

Demi terciptanya pengelolaan sampah yang baik pada Dinas Pasar,Kebersihan, dan Tata Kota Kabupaten Hulu Sungai Utara, tentunya harus ada kerjasama yang baik antara masyarakat dengan Dinas Kebersihan kabupaten Hulu Sungai Utara sendiri, yang jadi kendala adalah penyampaian informasi dari Dinas Pasar, Kebersihan, dan Tata Kota sendiri dalam bentuk sosialisasi ke masyarakat sangat minim, hanya terjadi dua kali dalam setahun, hal ini tentunya memicu kurangnya pengetahuan dari masyarakat sendiri tentang pentingnya pengelolaan sampah seperti belum adanya pemilahan antara sampah basah dengan sampah kering, masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah ke sungai, dan lain sebagainya.

Tentunya dengan adanya sosialisasi yang cukup akan menunjang terciptanya partisipasi masyarakat yang baik dalam pengelolaan sampah sendiri seperti yang di ungkapkan oleh Sumardi dan Evers (1982:3) mengungkapkan, “partisipasi mempunyai hubungan dengan kebutuhan pokok”. Lebih dari itu, partisipasi bersangkut paut dengan tiga hal yakni *‘mental and emotional involvement* (keterlibatan mental dan emosi), *motivation to contribute* (dorongan untuk memberikan sumbangan), dan *acceptance of responsibility* (penerimaan tanggung jawab).

Dalam hal ini, Kepala Desa Tangga Ulin Muhammad Zainal Ilmi sendiri meskipun masih belum pernah ada sosialisasi, penyediaan TPS ataupun sumbangan alat kebersihan baik berupa gerobak sampah atau bak sampah di desa kami, namun beliau menargetkan dalam dua bulan ke depan akan membuat TPS sederhana serta mengajak para warganya untuk turut serta dalam mengelola sampah di desa tersebut.

## KESIMPULAN

Gambaran deskriptif oleh aparat terkait pada Dinas Pasar,Kebersihan dan Tata Kota bisa dilihat dari Pertama, sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan pengelolaan sampah tidak memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Kedua, petugas kebersihan sebagai pelaksana di lapangan dari sisi kuantitas maupun kualitas tidak sebanding dengan karakteristik pekerjaan dan juga luas wilayah yang ada. Ketiga, partisipasi masyarakat tidak terwujudkan sebagaimana dikehendaki sehingga sampah basah dan kering terlihat bercampur aduk, jadwal membuang sampah tidak tertib, serta masih ditemuinya sampah yang dibakar, dibuang ke sungai ataupun ke sembarang tempat. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya pengelolaan sampah oleh aparat terkait pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Tata Kota diantaranya pertama kurangnya sarana dan prasarana, seperti yang kita ketahui bahwa tidak semua wilayah yang termasuk dalam pelayanan Dinas Kebersihan mempunyai TPS, sehingga pengelolaan tidak menyentuh seluruh lapisan masyarakat, kedua kurangnya sumber daya manusia dari pengelola sampah sendiri, jumlah sarana yang ada tidak seimbang dengan petugas yang menjalankan sarana tersebut, Dinas Pasar, Kebersihan dan Tata Kota mempunyai 12 unit truck sampah tetapi hanya mempunyai 10 orang sopir, ketiga, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pasar, Kebersihan dan Tata Kota sehingga penyampaian informasi kepada masyarakat menjadi kurang seperti pentingnya pemilahan antara sampah basah dengan sampah kering, serta masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah ke sungai.

Disarankan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu meningkatkan anggaran yang diperuntukkan bagi kegiatan pengelolaan sampah, seperti penyediaan sarana dan prasarana yang cukup serta penambahan petugas pengelola sampah, khusus Dinas Pasar, Kebersihan dan Tata Kota, penyuluhan kepada masyarakat harus diintensifkan dengan tidak lagi semata mengandalkan peran aparat desa/kelurahan dan tokoh masyarakat setempat. Sebagai sarana sosialisasi, dapat dilakukan penempelan stiker pada rumah warga dan toko terutama di pasar serta mendesain ulang substansi himbauan pada papan reklame yang telah ada. Sosialisasi dapat pula ditempuh melalui radio swasta Gema Khuripan Amuntai atau Radio Nirwana Amuntai, Serta beberapa media televisi yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara seperti Karias Chanel dan Oggi Vision yang siarannya mencakup seluruh kawasan kabupaten Hulu Sungai Utara. Memanfaatkan struktur masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mempunyai semboyan Amuntai Kota Bertakwa, maka peran para ulama dapat diikutsertakan dalam sosialisasi kebersihan setiap kali digelarnya pengajian atau majelis talim. Apalagi ditunjang dengan turut hadirnya staf Dinas Kebersihan kabupaten Hulu Sungai Utara. Sosialisasi sebagaimana dimaksudkan di atas sedikitnya memuat perihal pemilahan sampah basah dan kering di tingkat domestik (rumah tangga), jadwal membuang sampah yang diperbolehkan, dan sanksi bagi pelanggarnya yang bukan hanya teguran lisan, Di sisi lain, perlu dibentuk satu desa/kelurahan sebagai pilot

project kawasan percontohan bebas sampah, Perlombaan kebersihan antar desa/kelurahan yang didesain untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan juga perlu diselenggarakan.

## REFERENSI

- Islamy,Irfan. 1997. *Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sadyohutomo, Mulyono. 2009. *Manajemen Kota dan Wilayah : Realita dan Tantangan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kastaman, Roni dan Ade Moetangad Kramadibrata, 2007. *Sistem Pengelolaan Reaktor Sampah Terpadu (silar satu)*. Bandung: Humanoria
- Keban,T. Yeremias. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media..
- Solichin, Abdul Wahab. 2012. *Analisis Kebijakanaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakanaksanaan Negara (Edisi 2)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Yustika, Ahmad Erani. 2013. *Ekonomi Kelembagaan, Paradigma, Teori, Kebijakan*. Surabaya: Erlangga